

ISSN-E: 2623-2065
ISSN-P: 2684-8872

SINDANG

JURNAL PENDIDIKAN SEJARAH DAN KAJIAN SEJARAH

Vol 1 No. 2 (Juli-Desember 2019)

Penerapan Media Pembelajaran Kartu Permainan Sejarah dalam Meningkatkan Keaktifan Belajar Peserta Didik (Studi Kasus pada Kelas X-TKJ SMK Wahdatul Jannah Majalengka)

Galun Eka Gemini

Sejarah Toponim Prabumulih sebagai Sumber Pembelajaran Sejarah di MAN 1 Prabumulih

Marini, Kabib Sholeh, Sukardi

Inovasi dalam Pembelajaran Sejarah

Ilham Pramayogi, Rully Putri Nirmala Puji, Wiwin Hartanto

Nilai Edukasi Candi Jabung Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo dalam Pembelajaran Sejarah

Eko Muhammad Arif Budiono, Bambang Soepeno, Rully Putri Nirmala P

Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Sejarah dengan Penggunaan Pembelajaran Kooperatif Model *Teams Games Tournament* (TGT) pada Siswa Kelas XI IPS 2 Semester 1 Tahun Pelajaran 2018/2019 SMA Kristen Satya Wacana Salatiga

Raden Wahyu Joyo Diningrat

Kulturasi Ajaran Islam melalui Sistem dan Lembaga Pendidikan Islam pada Masyarakat masa Kesultanan di Nusantara

Sarkowi dan Muhamad Akip

Sejarah Kebudayaan: Hasil Kebudayaan Material dan Non-Material Akibat adanya Pengaruh Islam di Nusantara

Alfain Nur Mustawhisin, Rully Nirmala Puji, Wiwin Hartanto

Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Asing di Aceh Timur (1945-1968)

Halimatussa'diah Simangunsong dan Suprayitno

Elite Tradisional dalam *Onder Afdeling Rawas* Masa Kekuasaan Belanda Tahun 1901-1942

Agus Susilo dan Sarkowi

TRIP Jawa Timur

Firza Azzam, Rully Putri Nirmala Puji, Wiwin Hartanto



Dewan Redaksi

SINDANG: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Kajian Sejarah

Editor in Chief

Risa Marta Yati, M.Hum (STKIP PGRI Lubuklinggau)

Section Editor

Ira Miyarni Sustianingsih, M.Hum (STKIP PGRI Lubuklinggau)

Guest Editor

Dr. Syarifuddin, M.Pd. (Universitas Sriwijaya)

Ayu Septiani, M.Hum. (Universitas Padjadjaran)

Reviewer/Mitra Bestari

Prof. Dr. Sariyatun, M.Pd., M.Hum. (Universitas Sebelas Maret)

Dr. Umasih, M.Hum. (Universitas Negeri Jakarta)

Dr. Ida Liana Tanjung, M.Hum. (Universitas Negeri Medan)

Kunto Sofianto, Ph.D. (Universitas Padjadjaran)

Asyhadi Mufsi Sadzali, M.A. (Universitas Jambi)

Administrasi

Viktor Pandra, M.Pd. (STKIP PGRI Lubuklinggau)

Dr. Doni Pestalozi, M.Pd. (STKIP PGRI Lubuklinggau)

Dewi Angraini, M.Si. (STKIP PGRI Lubuklinggau)

SINDANG: JURNAL PENDIDIKAN SEJARAH DAN KAJIAN SEJARAH
Vol.1 No. 2 (Juli-Desember 2019)

	Halaman
Dewan Redaksi	i
1. Penerapan Media Pembelajaran Kartu Permainan Sejarah dalam Meningkatkan Keaktifan Belajar Peserta Didik (Studi Kasus pada Kelas X-TKJ SMK Wahdatul Jannah Majalengka) <i>Galun Eka Gemini</i>	1
2. Sejarah Toponim Prabumulih sebagai Sumber Pembelajaran Sejarah di MAN 1 Prabumulih <i>Marini, Kabib Sholeh, Sukardi</i>	9
3. Inovasi dalam Pembelajaran Sejarah <i>Ilham Pramayogi, Rully Putri Nirmala Puji, Wiwin Hartanto</i>	17
4. Nilai Edukasi Candi Jabung Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo dalam Pembelajaran Sejarah <i>Eko Muhammad Arif Budiono, Bambang Soepeno, Rully Putri Nirmala P</i>	23
5. Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Sejarah dengan Penggunaan Pembelajaran Kooperatif Model <i>Teams Games Tournament</i> (TGT) pada Siswa Kelas XI IPS 2 Semester 1 Tahun Pelajaran 2018/2019 SMA Kristen Satya Wacana Salatiga <i>Raden Wahyu Joyo Diningrat</i>	28
6. Kulturasi Ajaran Islam melalui Sistem dan Lembaga Pendidikan Islam pada Masyarakat masa Kesultanan di Nusantara <i>Sarkowi dan Muhamad Akip</i>	36
7. Sejarah Kebudayaan: Hasil Kebudayaan Material dan Non-Material Akibat adanya Pengaruh Islam di Nusantara <i>Alfain Nur Mustawhisin, Rully Putri Nirmala Puji, Wiwin Hartanto</i>	54
8. Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Asing di Aceh Timur (1945-1968) <i>Halimatussa'diah Simangunsong dan Suprayitno</i>	67
9. Elite Tradisional dalam <i>Onder Afdeling Rawas</i> Masa Kekuasaan Belanda Tahun 1901-1942 <i>Agus Susilo dan Sarkowi</i>	78
10. TRIP Jawa Timur <i>Firza Azzam, Rully Putri Nirmala Puji, Wiwin Hartanto</i>	88

NASIONALISASI PERUSAHAAN-PERUSAHAAN ASING DI ACEH TIMUR (1945-1968)

Halimatussa'diah Simangunsong, Suprayitno
Program Studi Ilmu Sejarah Universitas Sumatera Utara
Alamat korespondensi: Hadiyah724@gmail.com

Diterima: 10 April 2019; Direvisi: 18 Juli 2019; Disetujui: 28 Juli 2019

Abstract

The Aceh Timur as territorial area which have been prepared by the east Indies government as center of financial investment foreign especially Holland in plantation and mining project. Pass through, the nationalit of the Aceh Timur tried to waive Holland restless which have exploided the available nature resources, being state possession. The nationalization in Aceh Timur being the phenomenon which being buried by the DI/TII whole happen in Aceh. Eventhough, the nationalization still happened in Aceh Timur. Taking over the foreign companies which consist in the Aceh Timur until 1960 whole republic possession and using for prosperous Indonesian people eventhough Industrial sector mining project or plantation sector.

Keywords: *Aceh Timur, nationalization, the foreign companies.*

Abstrak

Aceh Timur sebagai daerah batas telah disiapkan pemerintah Hindia-Belanda sebagai pusat penanaman modal swasta asing khususnya Belanda dibidang perkebunan dan pertambangan. Melalui nasionalisasi, Aceh Timur mencoba melepaskan diri dari belenggu Belanda yang selama ini telah mengeksploitasi sumberdaya alam yang ada, menjadi milik negara. Nasionalisasi di Aceh Timur menjadi peristiwa yang seakan terkubur oleh peristiwa DI/TII yang terjadi di Aceh. Namun nasionalisasi tetaplah terjadi di Aceh Timur. Pengambilalihan perusahaan-perusahaan asing yang ada di Aceh Timur sampai tahun 1960 seutuhnya telah berstatus milik Republik Indonesia dan dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia baik pada sector industri pertambangan maupun perkebunan.

Kata Kunci: Aceh Timur, nasionalisasi, perusahaan-perusahaan asing.

A. Pendahuluan

Aceh Timur yang merupakan daerah batas menyebabkan daerah ini berbeda dengan daerah-daerah lain di Aceh. Wilayahnya yang berbatasan langsung dengan Langkat menyebabkan daerah ini mengalami dampak perluasan perkebunan-perkebunan asing yang telah berkembang di Sumatra Timur. Kehadiran Pemerintahan Hindia-Belanda di Aceh Timur menjadikan wilayah ini mengalami perkembangan ekonomi selama periode 1898-1942 ditandai oleh kegiatan penanaman modal asing yang terus menjamur didaerah ini. Dualisme ekonomi juga terjadi pada masa berkuasanya Belanda di Aceh Timur dimana penanaman lada sebagai pertanian rakyat masih berjalan disamping munculnya pertambangan dan perkebunan besar milik asing. (Boeke, 1953; 3, Gade, 1991;144)

Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Indonesia belum sepenuhnya lepas dari cengkaman kolonial, terkhusus di bidang ekonomi yang sampai tahun 1950 ekonomi nasional masih dirongrong oleh pihak asing. Pada dekade 1950-an sektor ekonomi Indonesia masih didominasi perusahaan-perusahaan milik asing yang telah beroperasi sejak Pemerintah Hindia-Belanda masih berkuasa di Indonesia. Menghadapi keadaan yang demikian, maka lahirlah berbagai pemikiran untuk memperbaiki situasi tersebut, hingga akhirnya muncul pandangan yang dikenal dengan 'ekonomi nasional' atau 'nasionalisasi ekonomi'. (Bondan, 2001; xii) Dalam perumusan yang telah diberikan oleh Erades, maka Nasionalisasi "ialah suatu peraturan, dimana pihak penguasa

memaksakan semua atau segolongan tertentu untuk menerima (*dwingt te gedogen*), bahwa hak-hak mereka atas semua atau beberapa macam benda tertentu beralih kepada negara". (Gouw, 1960; 6)

Pada saat yang sama masalah perebutan Irian Barat antara Indonesia dan Belanda terjadi, setelah berulang kali Soekarno membawa masalah ini ke majelis internasional namun tak kunjung usai hingga Indonesia melakukan gebrakan besar yang mampu menggoncangkan dunia internasional dengan melakukan mogok kerja selama 1x 24 jam di perusahaan-perusahaan asing di Indonesia dan peristiwa ini menjadi cikal bakal terjadinya nasionalisasi perusahaan asing Indonesia.

Berdasarkan latar belakang di atas, terlihat jelas artikel ini bertujuan untuk mengungkap peristiwa nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing di Aceh Timur. Oleh karena itu, artikel ini juga berusaha menjawab permasalahan berikut: (1) Apa yang melatarbelakangi penanaman modal asing di Aceh Timur? (2) Bagaimana proses nasionalisasi perusahaan asing secara nasional di Indonesia? (3) Bagaimana proses nasionalisasi perusahaan asing di Aceh Timur pada tahun 1950-1958?

B. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan empat tahap dalam penelitian sejarah yaitu: heuristik, kritis, interpretasi dan historiografi. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan sumber-sumber sekunder karena sumber primer terkait dengan studi ini tidak ditemukan oleh penulis. Adapun yang dimaksud sumber sekunder yang relevan dengan studi ini diantaranya buku-buku seaman, kontemporer maupun karya ilmiah dari berbagai peneliti di Indonesia maupun dari luar Indonesia, serta penulis juga menggunakan majalah yang membantu penulis dalam rekonstruksi kembali fakta-fakta sejarah yang terjadi pada masa tersebut. Kemudian sumber-

sumber yang ditemukan kemudian di analisis melalui kritik sumber, interpretasi, dan kemudian dituliskan. Sebagai sebuah karya historiografi, studi ini dibatasi oleh lingkup spasial dan lingkup temporal. Lingkup spasial dalam studi ini yakni wilayah yang termasuk kedalam *Afdeeling Ooskust van Atjeh*, dan lingkup temporal mencakup periode 1989-1961, atau dari awal penanaman modal asing hingga proses nasionalisasi di Aceh Timur yang ditandai dengan keputusan Pemerintah Republik Indonesia.

C. Pembahasan

Penanaman Modal Asing di Aceh Timur (1989-1945)

Penanaman modal asing di Aceh Timur terus berkembang mulai akhir abad ke-19. Hal ini terjadi atas empat faktor penyebab masuknya para pemilik modal asing ke Aceh Timur. Pertama, letak Aceh Timur yang langsung berbatasan dengan Sumatera Timur. Faktor kedua, luasnya tanah yang tersedia dan cocok untuk ditanami tanaman karet dan kelapa sawit. Faktor ketiga, keamanan yang cukup terjamin bagi penanaman modal asing, dan faktor keempat, juga cukup penting dalam menarik penanaman modal untuk masuk ke Aceh Timur yakni tersedia sarana transportasi dan fasilitas lain (Gade, 1991; 144).

Penanaman modal asing di Aceh Timur terfokus pada dua sektor yakni pertambangan dan perkebunan. Di sektor pertambangan mulai tahun 1898, hal ini menjadi dampak dari terjadi krisis produksi pada sumur Telaga Said yang mulai mengering, sehingga BPM yang merupakan cabang dari perusahaan minyak milik Belanda *De Koninklijke* dari mulai mencari sumur minyak di Aceh Timur khususnya Peureulak (Thomas, 1989). Pada tahun 1907 perusahaan milik Belanda ini bergabung dengan *Shell Transport & Tradding Company (Shell)* milik Inggris dan kemudian dikenal *Royal Dutch Shell* yang merupakan satu-satunya perusahaan minyak caliber dunia yang

melakukan penambangan minyak di Indonesia (Freddy, 2010).

Sejak terbentuknya *Royal Dutch Shell* semua daerah konsensi *De Koninklijke* dan *Shell* dilaksanakan oleh BPM (Gade, 1991; 151) yang telah memperoleh konsensi untuk melaksanakan penambangan minyak di Aceh mulai melakukan penelitian kemungkinan adanya minyak dikawasan Peureulak, Rantau Panjang, Panton, Idi Rayeuk, Langsa dan sekitarnya.

Pada tahun 1901 *de Koninklijke* telah selesai memasang pipa sepanjang 130 km untuk menyalurkan minyak dari lapangan Peureulak ke kilang Pangkalan Brandan dan sebagian lagi dilalirkan ke dalam tank-tank penyimpanan atau *storage tank* di Pangkalan Susu untuk di ekspor dengan kapal tanker. Setelah dilakukan penggabungan konsesi BPM di Sumatera Utara terbagi dalam dua daerah pertambangan, yaitu; 10 dari daerah Kesultanan Langkat dan 8 kontrak blog di daerah Aceh (Pertamina, 1997: 65).

Pelaksanaan pertambangan minyak di Aceh Timur berlangsung berdasarkan Undang-Undang Pertambangan pada 1899 yang kemudian mengalami perubahan beberapa kali yakni pada 1900, 1904 dan 1918. Perubahan yang memberatkan perusahaan yakni UU tahun 1918 ialah pasal 5a yang memberikan kemungkinan penerimaan pemerintah menjadi lebih besar dari konsesi yang diberikan (Gade, 1991; 159).

Pada 1895 peminat pencarian minyak di Aceh Timur pada mulanya ialah orang yang bertindak sendiri-sendiri, karena modal yang kurang dan sulitnya mengurus izin pertambangan sehingga tahun 1897 mereka mulai menggabungkan diri dalam suatu badan usaha yang diberi nama *Edi en Perlak Syndicaat*. Sampai pertengahan tahun 1897 sebanyak 30 permohonan izin mencari minyak diajukan sindikat itu untuk seluruh wilayah Aceh Timur. Ketika sindikat itu diambil alih oleh perusahaan *Mijnbouw Maatschappij Atjeh*, permohonan izin serupa diperluas lagi

diseluruh Aceh (ARNAS: Alg. Sek. Bt. 30 Januari 1903, No.25, Gade, 1991; 153-154).

Pada 1875, di Rantau Panjang, Peureulak telah ditemukan sumur minyak produktif untuk dieksploitasi (Broersma, 1925; 33). Pada 1902 dan 1903 juga dilakukan pemboran di daerah Langsa, Peudada, Idie, Julo' Rayeu dan Cunda (Carmejoole, 1931; 75). Dimasa ini juga, ijin pencarian minyak yang dikeluarkan untuk seluruh Aceh berjumlah 21 buah. Pada tahun 1908 jumlah itu meningkat menjadi 108 buah (JMNOI, 1901;12, Braconier, 1911; 70, Gade, 1991; 154)

Dibidang perkebunan, Pemerintah Hindia-Belanda yang pertama kali membuka perkebunan karet pada tahun 1907 dengan konsesi seluas 5.000 HA, sebagai perkebunan percontohan ini sukses menarik perhatian para pemilik modal asing masuk ke daerah Aceh Timur. Setahun kemudian hadir pemodal swasta dari Belgia (Gade, 1991; 17) yakni A. Hallet yang membuka satu perkebunan karet di Sungai Liput dengan perusahaan perkebunannya *Societe Fienanciere de Caoutchouc* atau SOCFIN (Gade, 1991; 8). Selanjutnya tahun 1909 terjadi penambahan perusahaan perkebunan di Langsa dan Tamiang. Setahun kemudian bertambah lagi dua perkebunan, jumlahnya semakin bertambah ditahun 1911 ada tiga erkebunan baru (Swart, 1911, Gade, 1991; 63) totalnya ada tujuh perkebunan yang menanamkan modalnya dibidang perkebunan yakni *Onderneming Soengei Lipoet*, *Onderneming Kuala Simpang*, *N.V Moord Sumatra Rubber Maatschappij*, *Onderneming Soengei Ijoe*, *Tanjung Seumanto'*, *Batang Ara* dan *Mopoli* (Citra Aceh dalam Arsip Jilid II,,302-303). Hingga tahun 1918 luas lahan yang digunakan untuk perkebunan karet yakni 10.456 HA (Kreemer, 1922; 436)

Peningkatan pertumbuhan perusahaan-perusahaan perkebunan karet dipengaruhi oleh harga karet yang tinggi di pasaran Internasional (Leemkolk, 1914; 16, Gade, 1991; 162). Selaras dengan pertumbuhan pabrik-pabrik industri serta penggunaan mobil

yang meningkat, sehingga permintaan akan bahan baku berupa karet juga ikut meningkat.

Perkebunan kelapa sawit untuk pertama kalinya hadir di Indonesia dipelopori oleh orang-orang Belgia dan Prancis sejak 1911. Perkebunan-perkebunan kelapa sawit berpusat di Indonesia yakni Daerah Sumatera Timur (Asahan dan daerah belakang Belawan) dan Aceh (Kenegrian-kenegrian Tamiang) dengan areal yang digunakan untuk penanaman kelapa sawit di tahun 1914 mencakup seluas 2.630 HA (Verslag, 1925; 1925, blommendaal, 1937; Gade, 1991; 164-165).

Hingga 1912 di seluruh Aceh Timur terdapat 18 konsesi untuk perkebunan karet dan sebagian lagi lahan-lahan konsesi digunakan untuk penanaman kelapa sawit. Hingga 1923 telah ada sekitar 20 buah perkebunan di Aceh Timur, 12 diantaranya adalah perkebunan karet, tujuh perkebunan kelapa sawit, dan 1 perkebunan kelapa (Rusdi Sufi, 2008)

Hasil perkebunan karet mengalami keadaan yang dinamis, bahkan ditahun 1931 produksi perkebunan karet mampu menyentuh angka 6.200 ton, dengan harga yang stabil merupakan pencapaian sehingga para pengusaha dapat mengantongi keuntungan yang berlimpah (Gade, 1991; 168) Sama seperti halnya karet hasil dari perkebunan kelapa sawit juga menggiurkan tercatat saat terjadi krisis ekonomi dunia, produksinya kelapa sawit pada 1935 mampu menyaingi produksi karet dan 1939 produksinya mencapai 2.627 ton.

Uniknya perkebunan-perkebunan yang berada di Aceh Timur biasanya tidak hanya ditanam satu jenis tanaman, beberapa perkebunan menanam tanaman campur antara tanaman karet dan tanaman kelapa sawit seperti yang berada di Sungai Liput, Medang Ara, Batang Ara dan Mopoli, semuanya berada di *onderafdeeling* Tamiang.

Hadirnya para pemodal-pemodal asing dikancah industrialisasi di Aceh Timur, berdampak pada pola pertanian masyarakat sekitar, yakni munculnya

perkebunan-perkebunan rakyat yang tumbuh disekitar perkebunan-perkebunan besar, yakni berada di daerah Tamiang, Langsa, dan Idi. Terbukanya lapangan pekerjaan di perkebunan bagi masyarakat sekitar serta munculnya pasar-pasar baru yang lebih besar dibandingkan sebelumnya.

Nasionalisasi Perusahaan Belanda di Indonesia

Hingga 1950, Indonesia sebagai negara merdeka dari penjajahan Belanda belum sepenuhnya merdeka karena pada saat itu keadaan ekonomi di Indonesia masih dikuasa oleh asing ditandai masih tegaknya perusahaan-perusahaan asing di Indonesia. Para pemimpin bangsa mencoba mengurangi pengaruh ini dengan cara membangun ekonomi nasional melalui berbagai program yakni melalui program benteng yang dilaksanakan pada April 1950. Program Benteng dimaksudkan untuk membuka kesempatan bagi para pedagang pribumi untuk membangun basis modal di bawah perlindungan proteksi Pemerintah Indonesia (Historia, 2016).

Setelah Kabinet RIS di bubarkan pada tahun 1950, mulailah menyusun ekonomi nasional dengan menerbitkan Rencana Urgensi Perekonomian atau Rencana Urgensi Perindustria (RUP) (Bisuk, 1996; 190) pada tahun 1952-1953, ditetapkan anggaran sekitar Rp. 160 juta untuk membangun perusahaan dan pabrik-pabrik secara bertahap yang pembiayaannya dibebankan Bank Industri Negara (BIN) (Bisuk, 1996; 266). Namun pelaksanaan RUP ini sangat mengecewakan karena kurangnya tenaga ahli dan tenaga buruh sehingga RUP ini dianggap kurang berhasil.

Keadaan Indonesia semakin genting dengan permasalahan Irian Barat. Masalah ini melibatkan Indonesia dan Belanda, Indonesia beranggapan bahwa Irian Barat masuk kedalam wilayah republik karena Boven Digul yang berada di daerah ini menjadi saksi bisu perjuangan para pejuang mempertahankan kemerdekaan. Namun Belanda beranggapan bahwa

masyarakat Irian Barat memiliki gen melanesia sehingga berbeda dengan masyarakat Indonesia pada umumnya. Berbagai konsolidasi tidak membawa hasil yang memuaskan, hingga pada Desember 1957, Presiden Soekarno mengumumkan mogok kerja selama 24 jam di perusahaan Belanda. ini merupakan ancaman Soekarno apa bila masalah Irian Barat kembali tidak bisa masuk kedalam agenda PBB pada 25 November 1957.

Aksi mogok kerja berawal pada 3 Desember 1957 pada kantor pusat KPM di Jakarta yang dilakukan oleh serikat buruh yang berafiliasi dengan PNI (Partai Nasional Indonesia). Aksi di KPM menjadi awal munculnya aksi-aksi pengambilalihan lainnya dilakukan oleh serikat-serikat buruh yang berafiliasi dengan SOBSI (Sentral Organisasi Buruh Republik Indonesia) yang melakukan mogok kerja total terhadap perusahaan-perusahaan Belanda lainnya termasuk pengambilalihan *The Big Five* (Bondan, 2001; 62). Untuk mengamankan proses nasionalisasi KASAD Mayor Jendral A.H. Nasution selaku Penguasa Perang Pusat (Peperpu) mengeluarkan surat perintah 13 Desember 1957 bahwa proses pengambilalihan perusahaan asing berada dibawah kontrol militer. Serta dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan Belanda di Indonesia yang berlaku surut sejak tahun 1957. Perusahaan yang telah diambil alih kemudian di kelola oleh Badan Nasionalisasi Perusahaan Belanda (BANAS) yang dibentuk pada 1959.

Pemulangan warga negara Belanda yang berada di Indonesia juga menjadi dampak dari nasionalisasi perusahaan Belanda di Indonesia. Selain itu, dampak lain yang ditimbulkan dari nasionalisasi perusahaan Belanda berdampak buruk terhadap Indonesia yakni pembayaran ganti rugi yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Indonesia kepada para pemilik usaha yang telah diambil alih perusahaannya oleh pemerintah Indonesia. Untuk mengurus masalah ini maka pemerintah

membentuk Panitia Penetapan Ganti Kerugian.

Nasionalisasi Perusahaan Belanda di Aceh Timur

Pada 1950-an banyak terjadi pergolakan di daerah, salah satunya pergolakan yang terjadi di Aceh yakni pemberontakan DI/TII. Hal ini terjadi karena rasa kecewa masyarakat Aceh terhadap pemerintahan Indonesia yang memasukkan daerah Aceh di bawah Sumatera Utara. Pada tahun 1957 terjadi nasionalisasi perusahaan Belanda di Indonesia sebagai upaya menstabilkan kondisi ekonomi nasional, ini juga terjadi di Aceh Timur yang notabene sebagai daerah pusat penanaman modal asing di Aceh. Pada tanggal 13 Desember 1957, Mayor Jendral A.H. Nasution sebagai KSAD menjadi Penguasa Perang Pusat (Peperpu), menunjuk Sjamaun Gaharu sebagai Penguasa Perang Daerah (Peperda) Aceh untuk mengurus pengambilalihan perusahaan Belanda di Aceh berdasarkan keputusan menteri Pertahanan No. MP/4/222/57 tanggal 14 Maret 1957 (Ramadhan, 1998; 315)

Perkebunan dan pertambangan di Aceh Timur sejak awal Indonesia merdeka telah mulai diambilalih dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh para buruh ataupun pengusaha di Aceh yang mencoba mengupayakan peninggalan-peninggalan Belanda dan untuk dikelola oleh orang Indonesia.

Pengambilalihan lapangan-lapangan minyak bekas konsesi BPM didaerah Aceh dan Sumatera Utara dari tentara Jepang dipelopori oleh tokoh-tokoh masyarakat dengan dukungan Laskar Buruh Minyak (Pertamina, 1997; 88). Laskar Buruh Minyak pada waktu itu meminta kepada pihak Jepang agar menyerahkan tambang-tambang minyak namun Jepang menolaknya dengan alasan bahwa tambang minyak akan diserahkan kepada pihak sekutu. Namun, pada September 1945 (Pertamina, 1997; 46), sekutu yang diwakili oleh Jepang menyerahkan tambang-tambang minyak setelah melihat keadaan di ladang-ladang dan

kilang-kilang minyak dibekas konsesi BPM setelah terjadinya bumihangus. Setelahnya dengan persetujuan Gubernur Sumatera Laskar Buruh Minyak membentuk Perusahaan Tambang Minyak Negara Republik Indonesia (PTMNRI) dengan 2 cabang yakni Aceh dan Langkat. Hal ini bertujuan untuk perbaikan terhadap kilang-kilang minyak yang rusak akibat bumi hangus yang dilakukan di kilang-kilang minyak didaerah Rantau, Aceh Tamiang dan Langkat dalam upaya produksi dapat ditingkatkan (Pertamina, 1997; 88).

PTMNRI berganti menjadi PERMIRI (Perusahaan Minyak Republik Indonesia) karena kondisi Pangkalan Brandan yang tidak memungkinkan maka, pusat pengoperasian tambang minyak dialihkan Aceh. Dengan kilang minyak mencapai kapasitas 10 ton perhari, sangat membantu perjuangan bangsa Indonesia di Sumatera Utara dan sekitarnya. Produksi minyak bumi dari PERMIRI dari kilang minyak Langsa yang dihasilkan dari lapangan minyak Rantau, Palu Tabuhan, Rantau Panjang, Perlak, Julok Rayeuk Darat, Telaga Said, Aru Bai, Uebong, Pase dan Serang Jaya. Hingga pada akhir agresi militer ke dua yang dilancarkan pihak Belanda, hanya didua tempat yang mampu dikuasi Republik Indonesia dalam melakukan kegiatan industri perminyakan nasional, yaitu di PERMIRI Langsa dan Cepu Barat (Pertamina, 1997; 104-108).

Kemudian akhirnya Nirwonojudo berhasil mempersatukan urusan minyak Aceh dan Langkat dibawah nama Tambang Minyak Sumatera Utara (TMSU), namun kinerjanya kurang memuaskan sehingga pemerintah melakukan peninjauan kembali (Pertamina, 1997; 132). Peraturan pemerintah No 34 tahun 1956 dikeluarkan yang mengatur pengawasan pemerintah atas tambang-tambang minyak di Aceh dan Sumatera Utara yang dikenal sebagai tambang minyak Sumatera Utara.

Pada 22 Juli 1957, Menteri Perindustrian dan Perdagangan menyerahkan kekuasaan mengenai

TMSU kepada kepala staf angkatan darat yang saat itu dijabat oleh Jendral Abdul Haris Nasution. Kemudian Jendral Abdul Haris Nasution menunjuk Ibnu Sutowo untuk bertanggung jawab mengurus tambang-tambang minyak tersebut dengan dalih bahwa Ibnu Sutowo telah memiliki pengalaman yang cukup dalam menghadapi masyarakat Sumatera (Pertamina, 1997; 57).

Sesudah itu menteri perindustrian pada 15 Oktober 1957 menetapkan dan menyempurnakan penyerahan kekuasaan kepada angkatan darat itu dengan memberi kuasa untuk memebentuk Perusahaan Terbatas (PT) Eksploitasi Tambang Minyak Sumatera Utara (PT. ETMSU) sebagai pemegang saham atas nama pemerintahan Republik Indoensia bertindak Ibnu Sutomo dan asistennya Mayor Harijono. Tidak lama sesudah, Jendral Abdul Haris Nasution memerintahkan supaya nama PT ETMSU diubah untuk menunjukkan bahwa lapangan minyak bumi itu aset nasional dan milik masalah provinsi saja. Pada tanggal 10 Desember 1957 nama PT ETMSU diubah menjadi PT Perusahaan Minyak Nasional (PT PERMINA) (Pertamina, 1997; 134).

Pengambilalihan perkebunan-perkebunan milik Belanda sejak Indonesia merdeka mulai diambilalih pemerintahan daerah Aceh sejak tahun 1945. Pada April 1946, Kebun-kebun milik orang Jepang yang dikerjakan oleh perusahaan *Nanyo Goma* dan *Nomura* di Aceh Timur, kemudian disatukan dan dibawah pimpinan Sutan Barus dan Arif Siregar dan ditahun berikutnya kemudian diganti oleh Alimuddin dan Marah Husin. Untuk menunjang pelaksanaannya didirikan Kantor Pusat Perkebunan Daerah Aceh di Kutaraja dan Badan Kemakmuran yang kemudian pada tahun 1947 diganti dengan Kantor Perdagangan yang bertugasnya menjual hasil perkebunan dan menyediakan keperluan-keperluan perkebunan (Amin, 1978: 95; Mawardi, 2005). Dan pada masa perang kemerdekaan hasil perkebunan ini

menjadi pemasukan utama bagi Pemerintah Aceh (Zulfan, 1995; 81).

Pada masa perang kemerdekaan, pemerintah Aceh memiliki kesediaan karet yang amat melimpah, dari gudang-gudang karet yang dikumpulkan oleh Jepang. Persediaan karet ini kemudian dijual dan Pemerintah Aceh juga memperoleh pendapatan dari hasil sewa tanah perkebunan sebesar f. 19.800,- pada tahun 1947. Namun hasilnya tidak terlalu memuaskan sehingga pada tahun 1948 perkebunan-perkebunan ini diambilalih oleh pemerintah pusat (Zulfan, 1995: 42). Penjualan dilakukan dengan sistem "barter" antara hasil perkebunan dengan barang-barang kebutuhan daerah Aceh seperti kain dan perlengkapan senjata. Kegaitan barter ini tidak terlepas dari peranan pengusaha Aceh, salah satunya Muhammad Saman dari P.T Puspa (Mawardi, 2005), yang melakukan barter dengan pengusaha asal Malaysia dan Singapura.

Dari Undang-undang No. 86 disebutkan perusahaan-perusahaan Belanda yang terkena Undang-undang tersebut, akan diumumkan yakni tujuh belas perkebunan tembakau milik *United Deli Company*, lima perkebunan milik *Senembah Company* dan tercatat ada enam belas perkebunan tembakau di Jawa sebagai perusahaan-perusahaan yang akan dinasionalisasi. Dari sekitar tujuh puluh enam perkebunan tanaman umur panjang yang disebut di Sumatera Utara, termasuk Aceh, lima puluh empat adalah perkebunan karet, tiga belas perkebunan kelapa sawit, lima perkebunan teh dan empat perkebunan sisal dan tanaman berserat lainnya. Diantara perusahaan yang penting yang disebut adalah *United Deli* (dua belas perkebunan) dan *Senembah Maatschappij* (empat perkebunan termasuk perkebunan tanaman umur panjang mereka), HVA (empat perkebunan), *Rubber Cultuur Maatschappij "Amsterdam"* (dua belas perkebunan) dan *Nederlandsche Handel Maatschappij* (NHM) (empat perkebunan) (Pelzer, 1991; 215). Menjelang awal tahun 1960-

an tercatat 101 dari 217 perkebunan di Sumatera Utara dimasukkan ke dalam pemilikan dan penguasaan pemerintah (Warinton: 255; Stoler, 2005; 255).

Perusahaan yang telah diambilalih kemudian dikelola oleh negara, tetapi pengelolaannya terpisah dalam manajemen tersendiri yang disebut Perusahaan Perkebunan Negara Baru atau PPN Baru, sedangkan PPN yang sudah ada disebut Perusahaan Perkebunan Negara Lama atau PPN Lama. Namun pada tahun 1961 keduanya digabung dalam satu manajemen di wilayah kerjanya meliputi unit kerja perkebunan, dan Unit Aceh menjadi salah satunya. Pada 1963 perusahaan perkebunan dikelompokkan menurut budaya jenis tanamannya dan pada tahun 1968 berubah lagi menjadi Negara Perkebunan (PNP). Perkebunan karet di Aceh Timur menjadi P.N. perkebunan I daerah TK.II Aceh Timur, dan pada 1980 dibentuk PTP 1 yang seluruh usahanya berada dalam wilayah Aceh Timur (1989; 142-143, Mawardi, 2005).

Berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 142 tahun 1961 tentang pendirian perusahaan perkebunan Negara Kesatuan Aceh, menyebutkan bahwa terdapat 11 perkebunan yang ada di Aceh Timur dilebur menjadi PPN Aceh yakni; perkebunan karet "Pulau Tiga", Perkebunan Karet "Bukit Panjang", Perkebunan Karet "Kebun baru/Langsa", perkebunan karet "Alu Gading", perkebunan karet "Simpang Kanan",v perkebunan karet Langsa, perkebunan karet "Tanjung Seumantoh", perusahaan "Paya Rambung/Paya Tampa;, perkebunan kopi "Burnin Bius", perkebunan kelapa sawit "Karang Inoue" dan perkebunan karet "Julu Rajeu". Pengawasan perusahaan perkebunan karet di Aceh Timur dilakukan oleh pihak militer hal ini dapat dilihat direktur utama PTPN I yaitu, Kol. Habib Muhammad Syarif yang dimulai pada tahun 1961.

Aksi-aksi buruh pada tahun 1950an juga mewarnai pantai timur Sumatera, aksi ini dipelopori oleh kelompok-

kelompok buruh yakni SARBUPRI atau Serikat Buruh Perkebunan Republik Indonesia dan SOBSI atau Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia. Keadaan ini berdampak buruk pada jalannya perusahaan perkebunan yang ada bahkan beberapa perusahaan harus gulung tikar saat menghadapi keadaan ini (Stoler, 2005;1 122).

Pemberontakan DI/TII terus bergolak di Aceh telah memakan korban pembunuhan dan penculikan baik itu rakyat maupun kaum buruh. Melihat keadaan Aceh Timur yang semakin panas para buruh yang tergabung dalam SOBSI, pada 26 Mei 1957 menyatakan bersatu dengan kekuatan tentara, sebagai perwakilan Indonesia untuk mematahkan aksi-aksi pemberontakan DI/TII (Citra Aceh Dalam Arsip Jilid IV; 713). Gerakan DI/TII ini berpengaruh bagi jalannya perusahaan-perusahaan tambang yang mencoba bangkit dari keterpurukan akibat bumi hangus yang terus terjadi di Pangkalan Brandan. Seperti Husin Almodjahid selaku pimpinan tambang minyak Aceh yang meninggalkan tugasnya demi bergabung dengan gerakan DI/TII (Pertamina, 1997; 131). Proses pengambilalihan perusahaan Belanda di Aceh Timur tidak terjadi secara dinamis, namun menjadikan gerakan DI/TII juga menjadi hambatan yang berarti dalam proses nasionalisasi perusahaan Belanda di daerah ini.

Pemberontakan DI/TII pada tahun 1953 (Nazaruddin, 1990; 77, Mawardi Umar, 2005) juga berdampak pada perkebunan di Aceh, karena mereka harus membayar pajak kepada NBA (Negara Bagian Aceh). Pada tahun 1960-an pihak perkebunan tidak punya pilihan lain kecuali harus menyetujuinya untuk menjamin jalannya usaha, karena saat ini mereka tidak dapat mengandalkan perlindungan dari pasukan pemerintah pusat. Pembayaran pajak terhadap NBA tersebut tidak dilaporkan kepada pemerintah. Demi untuk menjamin keselamatan dan kedudukan pimpinan perkebunan, karena NBA merekayasa seakan-akan pajak tersebut

dipungut dibawah todongan senjata (Nazaruddin, 1990: 77; Umar, 2005).

Selain perusahaan-perusahaan Belanda yang berkuasa di Aceh Timur, ada perusahaan asing lainnya yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit di Tamiang yakni SOCFIN. Perusahaan asal Belgia ini juga terkena imbas dari peristiwa nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia. Presiden Soekarno mengeluarkan Penpres No. 6/1965, yakni menempatkan semua perusahaan asing dibawah penguasaan pemerintah, terlepas dari negara asalnya, SOCFIN termasuk kedalam dalam peraturan ini maka ditahun yang salam Kementrian Perkebunan membentuk Petugas Pengawas Perkebunan Asing (PPPA) dan sebagian besar perkebunan di kelompokkan menjadi unit terpisah yang disebut PPN Expera (Ex perkebunan asing). SOCFIN masuk kedalam unit Expera II yang dikhususkan untuk perusahaan ini, dari empat unit yang terbentuk (Historia, No. 30, Tahun III, 2016).

Persoalan perkebunan eks Belanda juga masih bergulir hingga tahun 1968. Pada 12 Desember 1966, Jendral Soeharto mengeluarkan Intruksi Presidium Kabinet tentang pengembalian perusahaan-perusahaan asing ketangan pemiliknya. Hal ini juga dilakukan pemerintah Indonesia kepada perusahaan SOCFIN yang merupakan perusahaan asal Belgia, pada tahun 1968 perusahaan perkebunan SOCFIN dikembalikan sebagai perusahaan patungan antara Negara Belgia dan Pemerintah Indonesia (Historia, No. 30, Tahun III, 2016).

D.Kesimpulan

Dimulai tahun 1885, Pemerintah Hindia-Belanda telah mengizinkan para pencari minyak bumi untuk memasuki Aceh Timur, ini merupakan awal dari dibukanya daerah tersebut bagi perusahaan asing. Pada tahun 1898, BPM menemukan minyak di Peureulak dan menyulingnya di Pangkalan Brandan. Pada tahun 1907 Perintah Hindia-Belanda juga membuka

perkebunan percontohan sebagai alat untuk menarik perhatian para penanam modal untuk kembali memasuki wilayah Aceh Timur. Untuk mempersiapkan daerah industrialisasi di Aceh Timur, Pemerintah Hindia-Belanda menyediakan fasilitas, jaminan keamanan dan pembangunan infrastruktur agar para investor asing mau menanamkan modalnya di Aceh Timur.

Setelah Indonesia merdeka, negara ini mencoba membangun ekonomi nasional dengan cara melakukan nasionalisasi. Nasionalisasi dilakukan berdasarkan peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1958 yang berlaku surut sejak tahun 1957. Proses nasionalisasi diawali dengan aksi mogok kerja di perusahaan asing sebagai tindak tegas pemerintah Indonesia terhadap masalah pembebasan Irian Barat. Untuk mengamankan proses nasionalisasi KASAD Mayor Jendral A.H. Nasution selaku Penguasa Perang Pusat (Peperpu) mengeluarkan surat perintah 13 Desember 1957 bahwa proses pengambilalihan perusahaan asing berada dibawah kontrol militer. Pada tahun 1959 dibentuklah Badan Nasionalisasi Perusahaan Belanda (BANAS) dengan tujuan untuk mengurus perusahaan asing yang telah diambilalih.

Aceh Timur sebagai pusat industrialisasi di Aceh, tidak dapat terlepas dari proses nasionalisasi. Pengambilalihan kilang minyak dilakukan sejak awal kemerdekaan dan pada saat terjadinya Agresi Militer II kilang minyak Permiri di Langsa memiliki peranan penting dalam menyediakan sumber minyak yang nantinya digunakan untuk keperluan perang. Kemudian kilang minyak di Aceh kembali bergabung dengan kilang minyak di Sumatera Utara dan selanjutnya mengalami perubahan nama hingga pada tanggal 10 Desember 1957 atas usul A.H. Nasution perusahaan minyak di Sumatera Utara berubah namanya menjadi Perusahaan Minyak Nasional (PT Permina).

Perusahaan Perkebunan di Aceh juga telah lama menjadi tulang punggung ekonomi bagi Pemerintahan Aceh terlebih lagi pada awal-awal kemerdekaan Indonesia. Hasil-hasil perkebunan kemudian dijual ke Pulau Penang dan akan ditukarkan dengan barang-barang kebutuhan serta peralatan senjata untuk mendukung perang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dengan alasan ekonomi perusahaan perkebunan yang sebelumnya dikelola oleh pemerintah daerah Aceh kemudian diambil alih oleh pemerintah pusat saat terjadinya nasionalisasi dan pada tahun 1961 dibentuklah Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Aceh.

Daftar Referensi

Sumber Resmi Tercetak

- Aboe Bakar (alih bahasa). 1988. Antara Aceh dan Deli. Seri Informasi Aceh Th. XI. No.2. Aceh; PDIA
Citra Aceh dalam Arsip Jilid II. Aceh; PDIA
Citra Aceh dalam Arsip Jilid IV. Aceh; PDIA

Buku

- Broersma, R. 1925. *Atjeh Als Land Voor Handel en Bedrijf*. Utrecht: Gebrs. Cohen.
Dahana, A dkk. *INDONESIA dalam ARUS SEJARAH Pasca revolusi*. Jakarta; PT Ichtiar Baru van Hoeve.
Hill, Hal. 1990. *Investasi Asing dan Industrialisasi Di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
Ismail, Muhammad Gade. 1991. *Seuneubok Lada, Uleebalang, dan Kumpeni Perkembangan Social Ekonomi di Daerah Batas Aceh Timur, 1840-1942*. Leiden: Academish Proefschrift de Rijksuniversiteit Leiden.
Jongejans, J.. 1939. *Land en Volk van Atjeh; Vroeger en Nu*. Barn: Holland Drukkerij
Kanumoyoso, Bondan. 2001. *Nasionalisasi Perusahaan Belanda di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

- Umar, Mawardi. 2005. *Mengadu Nasib Di Kebun Karet: Kehidupan Buruh Onderneming Karet di Aceh Timur, 1907-1939*. Banda Aceh: Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh.
- KH, Ramadhan dan Hamid Jabbar. 1998. *Sjamaun Gaharu Cuplikan Perjuangan di Daerah Modal*. Jakarta; Pustaka Sinar Harapan.
- Langhout. J. 1923. *Vijftig Jaren Economische Staatkunde in Atjeh*. Den Haag: W.P. Van Stockum & Zoon.
- P.J. Carmejoole. 1931. *ATJEH*. Batavia: Groningen
- Pelzer, Karl J. 1991. *Sengketa Agraria Pengusaha Perkebunan Melawan Petani*. Jakarta: Puastaka Sinar Harapan.
- Perangin-angin, Christian Orchard. 2017. *Nasionalisme di Perusahaan Nasionalisasi: Menuju Profesionalisme Perusahaan BUMN Perkebunan*. Jakarta; Bhuana Ilmu Populer.
- Perangin-angin, Christian Orchard. 2017. *Nasionalisme di Perusahaan Nasionalisasi: Menuju Profesionalisme Perusahaan BUMN Perkebunan*. Jakarta; Bhuana Ilmu Populer.
- Pertamina dari Puing-puing ke Masa Depan Refleksi dan Visi 1957-1997*. 1997. Jakarta: Persekutuan Davidian Masehi Advent.
- Piekaar, A.J.1949. *Atjeh en De Oorlog met japan*. The Hague: van Hoeve,
- Pigay, Decki Natalis BIK. 2000. *Evolusi Nasionalisme Dan Sejarah, Konflik Politik Di Papua*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Pranoto, Suhartono W. 2014. *Teori & Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Siahaan, Bisuk. 1996. *INDUSTRIALISASI DI INDONESIA Sejak Hutang Kehormatan Hingga Banting Stir*. Jakarta: Pustaka Data.
- Siong, Gouw Giok. 1960. *Segi-segi Hukum Internasional pada Nasionalisasi di Indonesia*. Jakarta: Penerbitan Universitas.
- Stoler, Ann Laura. 2005. *Kapitalisme dan Konfrontasi di Sabuk Perkebunan Sumatra 1870-1979*. Yogyakarta: Karsa.
- Sufi, Rusdi dkk. *Sejarah Perkeretaapian di Aceh*. (Banda Aceh: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, 2001), hlm..18.
- Sufi, Rusdi, Agus Budi Wibowo, dan Sri Waryanti. *Sejarah Kabupaten Aceh Timur dari masa kolonial hingga kemerdekaan* (online). (Badan Arsip dan perpustakaan Provinsi Aceh. 2008) diakses pada tanggal 25 Maret 2018.
- Sufi, Rusdi, Seno, Djuniat. 1996. *Sejarah Kotamadya Banda Aceh*. Banda Aceh; Direktorat Jendral Kebudayaan.
- Thee Kian Wie. 1994. *Industrialisasi Di Indonesia, Beberapa Kajian*. Jakarta: LP3ES.
- Yuwono, Ismantoro Dwi. 2013. *Mafia Migas VS Pertamina*. Galang Pustaka.
- Skripsi**
- Julianti Sahputri. "Peranan PT. Perkebunan Nusantara I Dalam Meningkatkan Pendidikan Islam di Tanjung Seumantoh Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2000-2015". *Skripsi Program Studi Ilmu Sejarah, Universitas Samudra Langsa*
- Mariam, Sonia Ranggita. "Nasionalisasi De Javashe Bank: Dampak Ekonomi & Politik 1946-1959". *Skripsi Program studi Ilmu Sejarah, Universitas Airlangga*.
- Sukadji. 1981. "Masalah Ganti Rugi Dalam Tindakan Nasionalisasi". *Skripsi Fakultas Hukum. Universitas Airlangga*.
- Jurnal**
- Ahmad Muhajir, Dewi Yuliati, dan Yety Rochwulaningsih. *Industrialisasi dan eksistensi kota langsa pada era kolonial, 1907-1942* (online), hal. 68. <https://Journal.unnes.ac.id>. Diakses pada tanggal 21 Juni 2018.
- Lindblad, J. Thomas. 1989. *The Petroleum Industry In Indonesia Before The Second World War*, (Online) *Bulletin of Indonesia Economic Studies*, Vol 25 No.2, Agustust 1989. (dalam www.tandfonline.com, diakses 13 Juni 2018)
- Lindblad, J. Thomas. 2008. *Bridges to New Business: the Economic Decolonization of Indonesia*(Online).

www.sci-hub.tw . Diakses pada tanggal 29 Mei 2018.

Sismudijito. "*Nasionalisasi Perusahaan Hindia-Belanda Dalam Perspektif Sosiologis*". Prosiding Seminar Nasional, Program Corporate Social Responsibility (CSR) Berbasis Komunikasi Implementasi Konsep Triple Bottem Lines (dalam <http://repository.usu.ac.id/bitstream/.../pdf>, diakses 18 Februari 2018).

Wasino. 2005. "*Nasionalisasi Pabrik Gula Mangkunegaran*". *Lembaran Sejarah*, Vol. 8, No.2 (dalam <http://lib.ugm.ac.id/jurnal/.../pdf>, diakses 18 Februari 2018).

Majalah

Majalah Energi Pertamina EP, edisi Tahun II (Volume 3 Maret 2015)
Majalah Historia. No.30. Tahun III. 2016.

Makalah

Mawardi Umar. 2005. *Getah dan Revolusi: Nasionalisasi Perkebunan Karet di Aceh Timur 1945-1970*. Makalah seminar dan Workshop. Palembang.

Internet

<https://Freddyilhamsyah.wordpress.com>. 2 Agustus 2010, diakses pada tanggal 28 Mei 2018.